

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penulisan makalah di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kriteria penerima PKH di desa pelawi utara dapat dikatakan tidak sesuai dengan kriteria yang seharusnya. Menurut DTKS sasaran bantuan PKH seharusnya berada pada posisi desil 1 yang merupakan keluarga sangat miskin seperti yang tertera pada 14 kriteria keluarga miskin menurut BPS. Hal ini tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan KPM di desa pelawi utara. Dikarenakan pada hal ini mereka sebenarnya memang keluarga miskin. Namun, bukan pada level kesejahteraan desil 1. KPM desa Pelawi Utara berada pada level desil di atas keluarga sangat miskin. Hal ini dapat ditandai dengan hunian dan pendapatan KPM yang berada pada level di atas desil 1. Namun, atas pertimbangan dari PKH maka keluarga yang dianggap kurang mampu dan KPM juga menyepakati hal tersebut. maka mereka tetap diberikan bantuan PKH jenis PKH reguler.
2. Perilaku KPM memanfaatkan dana bantuan secara umum tidak mengikuti anjuran dari PKH. Meskipun pengakuan mereka kebutuhan pendidikan anak mereka tetap terpenuhi dengan adanya bantuan PKH komponen pendidikan. Perilaku penyalahgunaan dana bantuan ini didasari pada motif dorongan. dorongan merupakan perilaku yang didasari pada kebutuhan individu yang berbeda-beda. Selain terdapat perilaku umum, juga terdapat

perilaku khusus pada KPM yang menunjukkan bahwa mereka mengikuti anjuran PKH dalam memanfaatkan dana bantuan. Pengakuan beberapa KPM bahwa mereka hanya menggunakan dana bantuan PKH komponen pendidikan untuk biaya pendidikan dengan cara menyimpan dana bantuan jika tidak ada keperluan pendidikan yang harus dibayar. Hal ini didasari pada motif kognitif dalam berperilaku. Pikiran akan rasa khawatir jika terdapat kebutuhan biaya pendidikan yang mendadak dan mereka tidak memiliki uang. Maka dari itu perilaku demikian dilakukan oleh beberapa KPM. pemanfaatan biaya pendidikan yang paling tampak pada KPM adalah digunakan untuk biaya kuota internet untuk pelaksanaan pembelajaran daring.

3. Adapun implementasi behavioristik pada perilaku KPM desa Pelawi Utara adalah stimulus fisik dan non-fisik yang diberikan PKH melalui dana tunai dan edukasi yang diberikan PKH. penggunaan dana bantuan tidak menghasilkan respon yang diinginkan. Artinya respon yang dihasilkan atau perilaku yang tampak tidak sesuai dengan edukasi yang diberikan oleh pendamping. Hal ini ditandai dengan adanya penyalahgunaan dana bantuan PKH komponen Pendidikan. Meskipun beberapa KPM terlihat menunjukkan respon yang diberikan oleh pendamping KPM dengan perilaku tetap menggunakan dana bantuan PKH komponen pendidikan untuk biaya pendidikan anaknya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat penulis rekomendasikan, yaitu:

1. program bantuan sosial tunai yang bersifat langsung tentu saja memiliki potensi rentan untuk terjadi penyalahgunaan bantuan. Jika bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan lain maka tujuan program tidak akan berjalan maksimal. Hasilnya keluarga miskin akan tetap merasa susah dan menganggap bahwa mereka memiliki keterbatasan dalam mengakses fasilitas-fasilitas yang diberikan. Maka dari itu, sangat dianjurkan bagi masyarakat yang menerima bantuan sosial dalam bentuk dana tunai sebaiknya dimanfaatkan sesuai dengan anjuran penggunaan yang ditetapkan. Agar tujuan yang ingin di capai juga terpenuhi.
2. Kenyataan yang menunjukkan bahwa beberapa penerima bantuan PKH justru merasa bergantung dengan bantuan juga merupakan masalah serius yang harus diperhatikan bagi pemerintah selaku pemberi bantuan. Hal ini justru akan menyulitkan bagi masyarakat miskin agar menjadi masyarakat yang mandiri. akan lebih baik jika penanganan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin diperhatikan dengan benar. Baik dari proses penyaluran dana dan juga pendampingan yang dilakukan. Saran penulis terkait hal ini agar pemerintah sebaiknya memperbanyak program yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Karena jika ingin menciptakan masyarakat yang mandiri maka pemberdayaan penulis anggap merupakan cara yang cukup baik untuk dilakukan. Selanjutnya untuk kriteria penerima bantuan

PKH Reguler yang sebenarnya banyak bukan dari golongan keluarga sangat miskin tentu juga dapat menjadi suatu masalah yaitu terjadinya penyaluran dana bantuan yang tidak tepat sasaran dikarenakan jumlah keluarga sangat miskin yang rendah. Berdasarkan hal tersebut penulis menyarankan agar yang memiliki kuasa atas peraturan penerima bansos agar merevisi tingkat kesejahteraan keluarga penerima PKH untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH.

